

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM PENINGKATAN KESEJATERAAN
MASYARAKAT DI DESA BANGKELEKILA'**

Diajukan Oleh :

Ardo Rante

4518012051



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM PENINGKATAN KESEJATERAAN
MASYARAKAT DI DESA BANGKELEKILA'**

Diajukan Oleh :

Ardo Rante

4518012051

UNIVERSITAS

BOSOWA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bangkelekila'
Nama Mahasiswa : Ardo Rante
Stambuk/NIM : 4518012051
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen

Telah Disetujui :

Pembimbing I **UNIVERSITAS** Pembimbing II

Dr. Chahyanto, SE., M.Si

Dr. Ir Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM. IPU

Mengetahui dan Mengesahkan :
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Manajemen

Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., M.Si

Ahmad Jumarding, SE., M.M

Tanggal Pengesahan.....

PERYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardo Rante

Nim : 4518012051

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bangkelekila'

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah di ajuhkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 10 Agustus 2022

Yang menyatakan,


Ardo Rante



ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KESEJATERAAN MASYARAKAT DI DESA

BANGKELEKILA'

Oleh :

ARDO RANTE

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen
Universitas Bosowa**

ASBTRAK

Ardo Rante. 2022. Skripsi. Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bangkelekila' di bimbing oleh Chahyono dan Lukman Setiawan.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. 2) Untuk mengetahui kendala yang di alami pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. menggunakan teknik analisis data interaktif. Teknik analisis data tersebut terdiri dari tiga komponen utama 1) Reduksi Data 2) Sajian Data 3) Penarikan Simpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan 1.) Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa belum Efektif, namun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah desa Bangkelekila' memfokuskan pada pembangunan jalan dan perbaikan jalan rusak sebagai sarana transportasi darat masyarakat, hal ini telah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat sudah cukup baik dengan melalui musyawah dusun, musyawarah desa hingga Musyawarah perencanaan pembangunan desa. 2) Pengawasan dan pembangunan Pemerintah Daerah telah dilakukan, namun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas mulai dari perencanaan sampai evaluasi dan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bangkelekila' yang ingin memiliki Infrastruktur yang bagus.

Kata Kunci : Efektivitas, Kesejahteraan Masyarakat, Dana Desa

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND
MANAGEMENT ON THE WELFARE OF THE COMMUNITY
IN THE VILLAGE BANGKELEKILA'**

By :

ARDO RANTE

**Faculty of Economics and Business Management
University Bosowa**

ABSTRACT

Ardo Rante. 2022. Thesis. Analysis of The Effectiveness of Village Fund Management in improving Community Welfare in Bangkelekila Village was guided by Chahyono and Lukman Setiawan.

The objectives of this study are: 1) To determine the effectiveness of village fund management on the welfare of the community. 2) To find out the obstacles experienced by the village government in managing village funds.

The type of research used is Qualitative. using interactive data analysis techniques. The data analysis technique consists of three main components 1) Data Reduction 2) Data Presentation 3) Conclusion Drawing.

The results of this study show 1.) The implementation of the village fund allocation management has not been effective, but it is in accordance with applicable regulations. Bangkelekila village government's' focuses on road construction and repair of damaged roads as a means of community land transportation, this has been in accordance with the priorities and needs of the surrounding community. Community participation has been quite good through hamlet deliberations, village deliberations to village development planning deliberations. 2) Supervision and development of local governments have been carried out, but the supervision carried out by the community is still limited, for example, it is still limited to physical participation without a broad role from planning to evaluation and Lack of community participation in the implementation of development in Bangkelekila Village' who want to have good infrastructure.

Keyword : Effectiveness, Community Welfare, Village Fund

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Mem peroleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar. Judul yang penulis ajukan adalah “ ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJATERAAN MASYARAKAT DI DESA BANGKELEKILA ” Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaika terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Chayono,. SE., M.Si dan DR. Ir Lukman Setiawan , S.Si., S.Psi., MM., IPU, Sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi – diskusi yang dilakukan dengan penulis.
2. Ibu Idrayani Nur, S.pd., SE., M.Si Selaku ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar
3. Bapak DR. H. A. Arifuddin mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya. selaku Rektor Universitas Bosowa.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

6. Terimakasih buat teman dekat saya Lukas, Mina, Erma, Dio dan seluru teman-teman satu kampus Tirsa, Monica, Naya dan Jessie yang selalu mendukung menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Lora Litta Tanna selaku bendahara desa Bangkelekila' yang telah membantu penulis memngumpulkan Dokumen Laporan keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Ibu Elisabet Tonapa, Bcs.SKM yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Bangkelekila, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara.

Bapak dan Ibu Orang tua saya atas jasa-jasanya, kesabaran, do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil. Teman-teman semua atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis ,Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan senang hati menerima

kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya tanpa henti penulis bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas kehendak-Nya skripsi ini dapat diselesaikan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya.Amin.

Makassar, 10 Agustus 2022

Penulis

ARDO RANTE
4518012051



UNIVERSITAS
BOSOWA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Bagan Kerangka Berfikir	22
Tabel 4.1 Perkembangan Legenda dan Sejarah Lembang Bangkelekila'	34
Tabel 4.2 Jumlah penduduk tahun 2020	36
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan di Lembang Bangkelekila Tahun 2021	37
Tabel 4.4 Mata Pencaharian	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif	29
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Lembang Bangkelekila'	40



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.1.1 Efektivitas`	9
2.1.2 Teori Kesejahteraan	10
2.1.3 Pemerintah Kepala Desa.....	12
2.1.4 Dana Desa	14
2.1.5 Konsep Desa	17
2.1.6 Kebijakan Desa.....	18
2.2 Kerangka Berpikir	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian	23
3.2 Metode Pengumpulan Data	23
3.1.1 Obseervsi	23
3.1.2 Wawancara	23
3.1.3 Dokumentasi	24
3.3 Jenis Dan Sumber Data	24
3.3.1 Jenis Data	24
3.3.2 Sumber Data	25
3.3.3 Sumber Data Sekunder	26
3.3.4 Jenis Penelitian	27
3.4 Metode Analisis.....	27
3.5 Defenisi Operasional	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Desa Penelitian.....	32
4.1.1 Sejarah Lembang Bangkelekila'	32
4.1.2 Kondisi Geografis	35
4.1.3 Demografi	36
4.1.4 Sosial Budaya	36
4.1.5 Pemerintahan	37
4.2 Gambaran Pemerintahan Lembang Bangkelekila'	38
4.2.1 Visi dan Misi Desa Bangkelekila'	38
4.2.2 Struktur Organisasi Desa Bangkelekila'	39
4.3 Efektivitas Pengelolaan Dana Lembang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Lembang Bangkelekila'	46
4.3.1 Perencanaan	53
4.3.2 Pelaksanaan	55
4.3.3 Pertanggung Jawaban.....	56
4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi.....	57
4.4.1 Faktor Pendukung.....	57

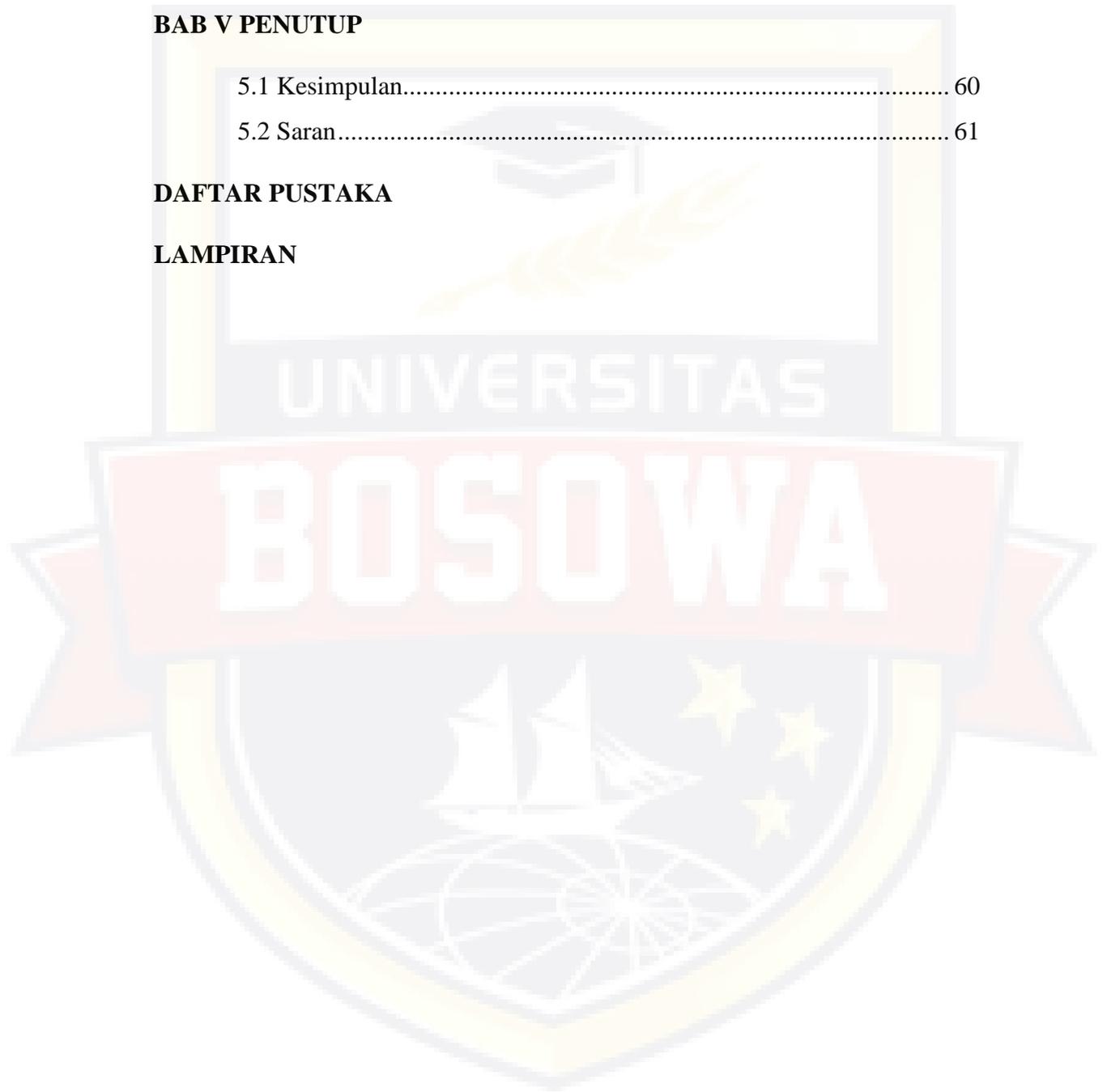
4.4.2 Faktor Penghambat	58
-------------------------------	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa.

Berdasarkan UU Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .

Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (Mustika Natsir, 2017)

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan adalah bagian dari usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa itu sendiri. Pelaksanaan pembangunan pedesaan mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Pembangunan Desa mencakup pembangunan di segala aspek baik ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan pertahanan keamanan. Pembangunan desa merupakan suatu proses dalam rangka meningkatkan kemampuan dari penduduk desa itu sendiri dalam segala aspek baik sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya, disertai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat desa itu sendiri (Teki Pangalo, 2020).

Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan di Indonesia. Namun realita yang terjadi dalam

pembangunan di Indonesia saat ini adalah adanya masalah kesejahteraan masyarakat yang belum merata baik secara materi maupun spiritual serta masalah kesenjangan pembangunan antar desa, antar wilayah dan antar kota. Untuk mengatasi masalah tersebut pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo menerapkan paradigma membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Program tersebut dilaksanakan karena desadesa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga peningkatan kesejahteraan dan pembangunan kurang merata (Prasetyo 2017).

Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa melalui penyaluran dana desa sebagai bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala Desa.

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kemudian ditamba dengan peningkatan tingkat kehidupan seperti pendapatan, pendidikan, yang lebih baik dan peningkatan etensi budaya dan nilai-nilai kemanusiaan serta memperluas

skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa (Todaro dan Stephen C. Smith, 2006).

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani serta mampu memberikan dukungan dalam proses pembangunan ekonomi negara. Salah satu strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama dipedesaan. Keberadaan Desa juga secara Yuridis diakui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertiannya dapat disimpulkan bahwa desa merupakan wilayah tertentu yang mempunyai dasar hukum serta memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam poin ini pula

dapat dilihat bahwa desa merupakan bagian penting dalam mensukseskan program-program pemerintah baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Hal itu dapat dilihat dari penduduk Indonesia yang masih merupakan masyarakat pedesaan yang tempat tinggal penduduk Indonesia masih bermukim di kawasan pedesaan. Dan ini terbukti dan sangat logis bahwa pembangunan desa menjadi prioritas utama dalam kesuksesan pembangunan Nasional. Sehingga banyak kegiatan atau program pemerintah yang disalurkan sampai ke masyarakat atau penduduk pedesaan, baik secara lembaga desa maupun ke masyarakat desa itu sendiri termasuk didalamnya penyaluran dana desa yang disediakan oleh pemerintah pusat guna pembangunan infrastruktur dan sarana desa (Roy Stevensen Iver Turere, 2018).

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Namun sebelum adanya anggaran Dana Desa, disetiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Jadi untuk pembangunan fisik belum terlihat kemajuannya sebab ADD itu pula dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan non fisik dan kegiatan fisik. Saat ini pemerintah desa dapat merasakan bantuan keuangan yaitu ADD, Dana Desa dan Dana bagi Hasil pajak dan Retribusi. Dana Desa langsung ditransfer

pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/Kota dan ditransfer dari pemerintah Kabupaten/Kota ke APBD Desa.

Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa harus dikelola secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

Pemerintah Lembang Bangkelekila' dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian sarta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Lembang adalah perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Dana Desa serta bagaimana dampaknya secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Apa saja kendala yang di alami pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

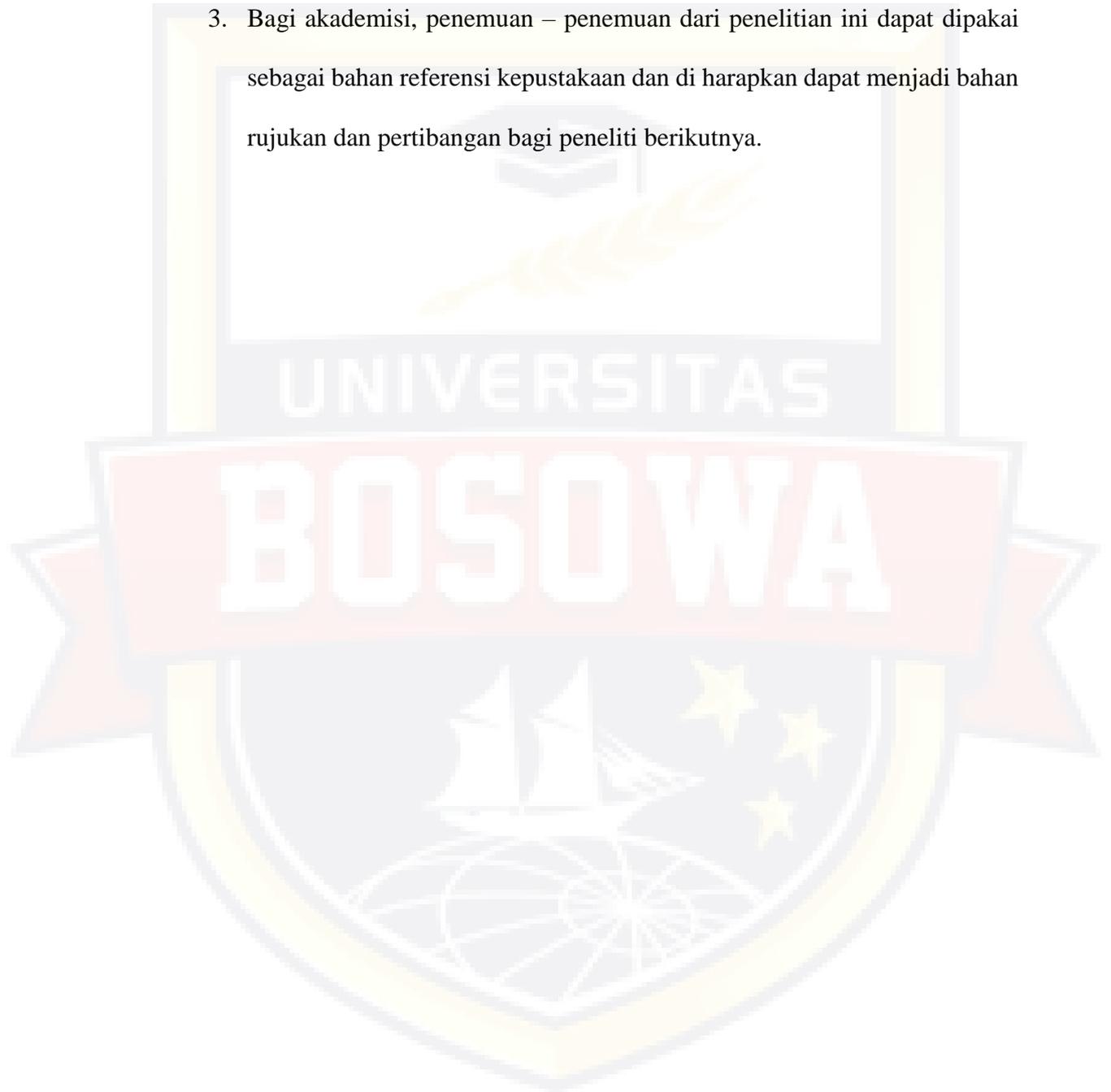
1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala yang di alami pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan dana desa agar tercapainya tujuan dana desa tersebut serta dapat berjalan secara efektif.
2. Bagi masyarakat umum, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa, sehingga kedepannya masyarakat lebih

berperan aktif dalam pengelolaan dana desa tersebut dari mulai perencanaan sampai pertanggung jawaban.

3. Bagi akademisi, penemuan – penemuan dari penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi kepustakaan dan di harapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Efektivitas

Menurut purnomo (2006) “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.1.2 Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmai dan rohani (Todaro dan Stephen C.smith, 2006).

Masyarakat terbentuk melalui proses relasi yang kontinyu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu lama menghasilkan perasaan

kebersamaan. Disamping itu, interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial, melainkan juga modal sosial.

Menurut Soetomo (2014:47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan

ekonomitanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standarkehidupan masyarakat (Teki Pangalo, 2020).

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.

Todaro (2003), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.

2.1.3 Pemerintah Kepala Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di Daerah tingkat 1 (satu), segala urusan yang di lakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, sehingga masyarakat yang ada di Desa mampu mengetahui penyaluran Dana Desa yang telah diberikan. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya bertanggung jawab secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan Desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

- a. Pokok-pokok muatan pemerintah tersebut, antara lain: Prinsip bagi transparan dan akuntabilitas mengenai penyusunan, perubahan, dan perhitungan APBDesa, pengelolaan kas tata cara pelaporan, pengawasan intern, otorisasi, dan sebagainya, dan prosedur pengelolaan;
- b. Pedoman laporan penanggung jawaban yang berkaitan dengan pelayanan yang di capai, biaya satuan komponen kegiatan, dan standar akuntansi pemerintah Desa, serta presentase jumlah penerimaan APBDesa untuk membiayai administrasi umum dan pemerintahan umum.

Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan Desa dan diwakili oleh pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang di pisahkan. Oleh karena itu, kepala Desa atau pemerintah Desa mempunyai kewenangan. Antara lain:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa;

3. Menetapkan bendahara Desa;
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; dan
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan keuangan Desa di bantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa bertindak selaku kordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab kepada kepala Desa. Pemegang kas Desa adalah bendahara Desa. Kepala Desa menetapkan bendahara Desa dengan keputusan kepala Desa.

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan baran Desa;
3. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan penanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
4. Menyusun rencana sebagai keputusan kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan dan tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

Pemerintah Desa wajib membuat APBDesa, melalui APBDesa kebijakan Desa yang di jabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah di tentukan anggarannya. Dengan demikian,kegiatan pemerintah Desa berupa pemberian layanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah di rancang anggarannya sehingga sudah di pastikan dapat di laksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintahan Desa tidak dapat melaksanakan program kegiatan pelayanan publik.

2.1.4 Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6/2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN, hal ini menunjukkan rekognisi Negara kepada desa. Adapun filosofi dari Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Menurut PMK No 241 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu tindakan pemerintah desa dalam mengurus dan menata pemerintahan yang baik dalam mengalokasikan dana desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut adalah wajib bagi pemerintah desa untuk melakukan dengan jalan musyawarah desa dimana hasil dari musyawarah desa tersebut akan dituangkan pada peraturan desa demi terciptanya kesejahteraan. Pemerintah desa hendaknya dalam pelaksanaan musyawarah desa melaksanakan prinsip pengelolaan anggaran dana desa yang meliputi transparansi, akuntabel serta partisipatif.

Kegiatan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi :

1. Perencanaan Pengelolaan anggaran dana desa melibatkan perencanaan dalam rangka menentukan program atau tujuan yang ingin dicapaisehingga dalam mengelola dana desa, pemerintah desa tidak melenceng dari tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan perencanaan dalam mengelola keuangan desa adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan dimana pelaksanaan merupakan tindakan dari suatu perencanaan. Pelaksanaan keuangan desa merupakan suatu proses dimana peraturan desa yang tertuang dalam APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa baik dalam pelayanan, pembangunan ataupun pemberdayaan.
3. Penatausahaan Kegiatan penatausahaan adalah kegiatan dimana semua kegiatan dalam pelaksanaan keuangan desa dikelola serta dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa.
4. Pelaporan Kegiatan pelaporan adalah hasil dari penatausahaan keuangan desa yang telah dikelola dan disampaikan oleh kepala desa kepada BPD, pengawas, serta masyarakat.
5. Pertanggung Jawaban
Pertanggungjawaban merupakan kegiatan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan.

2.1.5 Konsep Desa

Desa secara etimologis berasal dari kata dhesi dimana kata ini berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti tanah kelahiran. Sehingga kata desa yang mempunyai arti tanah kelahiran tidak hanya menunjukkan suatu wilayah saja melainkan juga memberi gambaran kehidupan sosial, budaya, serta kegiatan penduduknya.

Definisi desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa (kata benda) merupakan suatu kesatuan wilayah dimana wilayah ini dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri yang dikepalai oleh kepala desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Menurut Paul H. Landis dalam Desa adalah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian yang Sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Pembangunan desa pedesaan dengan mengedapkan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

2.1.6 Kebijakan Desa

Sebuah kebijakan dibuat pasti berangkat dari sebuah kondisi dimana kebijakan itu harus dibuat. Seperti halnya kebijakan publik, kebijakan publik dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan publik. Masalah tersebut begitu banyak macamnya, variasinya dan intensitasnya. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik itu bisa melahirkan kebijakan publik. Hanya masalah-masalah yang mampu menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik. (Widodo, Joko.2021: hal 14)

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut, meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri (Dura, 2016).

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan ini harus memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa kota.

Menurut Purwanto, Agus, dan Sulistyastuti (2015) kebijakan desa dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya sebagai berikut:

a. Akses

Pengertian dari akses adalah kesempatan yang sama bagi semua kelompok maupun individu yang meliputi gender, etnisitas dan agama. Akses juga dapat diartikan sebagai peluang yang sama bagi masyarakat dalam menikmati program dan kebijakan.

b. Bias

Pengertian dari bias merupakan penilaian yang digunakan dalam pemanfaatan program atau kebijakan yang diambil tidak terjadi penyimpangan. Pemanfaatan program dan kebijakan berlaku untuk semua, baik individu maupun kelompok.

c. Ketepatan layanan

Indikator ketepatan layanan digunakan dalam mengukur program yang dijalankan oleh pemerintah desa sesuai dengan ketepatan perencanaan dan waktu pelaksanaan.

d. Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas digunakan dalam mengukur penggunaan dana desa secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

e. Kesesuaian program dan kebutuhan

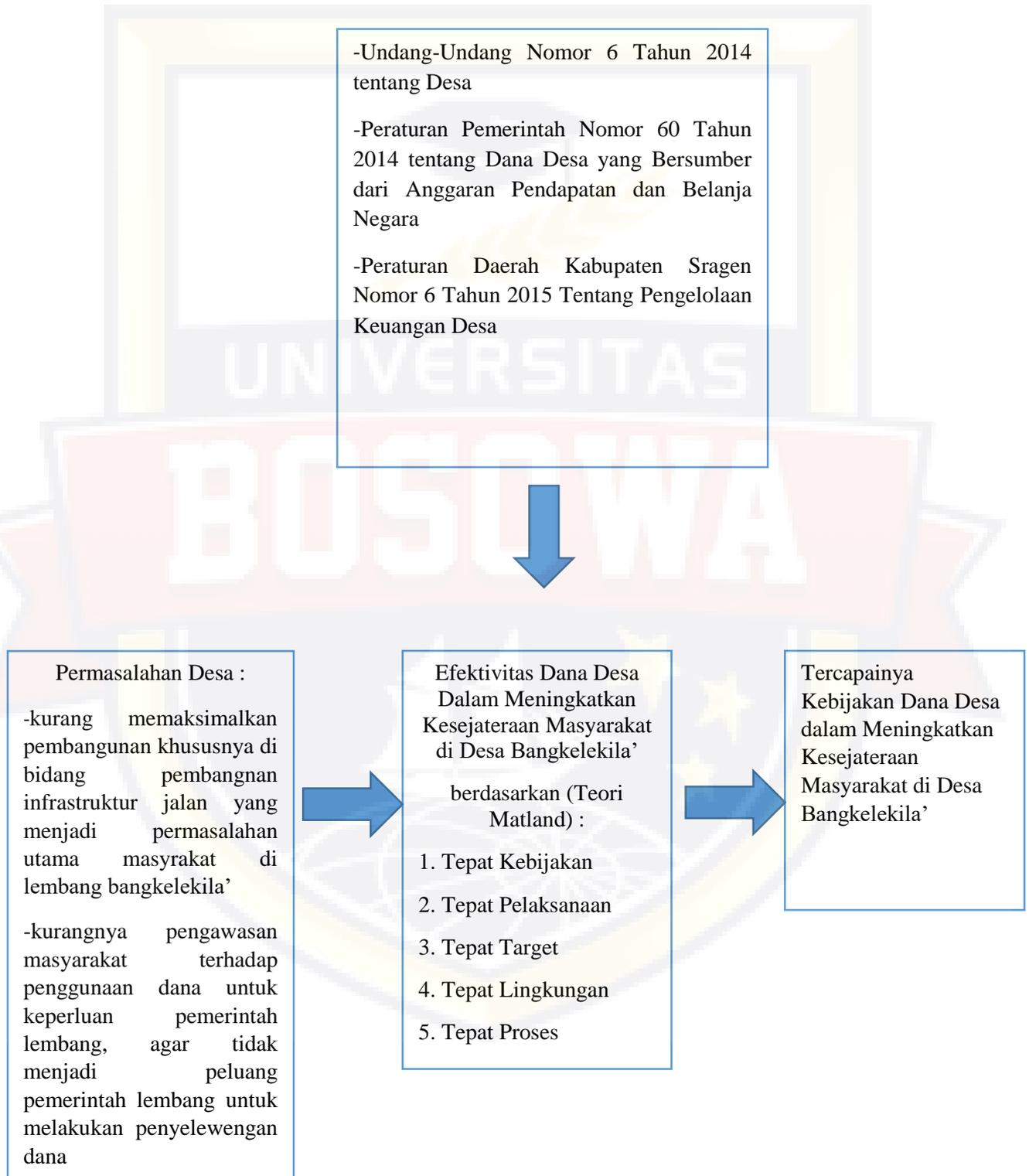
Indikator ini digunakan dalam mengetahui bahwa program dan kebijakan desa yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.2 Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai Evaluasi Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagaimana panduan serta memberikan batasan terhadap penelitian ini sehingga tujuan penelitian tercapai dengan baik.

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Strategi pengembangan disusun atas dasar analisa lingkungan serta visi, misi, dan tujuan organisasi/perusahaan dalam hal ini.

Tabel 2.2 Bagan Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Menetapkan lokasi dalam penelitian merupakan tahap penelitian yang sangat penting dimana dengan menetapkan lokasi penelitian berarti objek serta tujuan penelitian telah ditetapkan sehingga seorang peneliti akan mudah dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' yang meliputi 3 dusun yaitu Dusun Sangtanete, Dusun Sangkaropi', dan Dusun Torodasi. Penelitian ini dilakukan mulai Maret-April 2022.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan data dengan sebenarbenarnya dimana nantinya akan berguna terhadap hasil penelitian.

3.2.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan penelitian secara teliti dan juga pencatatan secara sistematis. Poerwandari mendefinisikan observasi sebagai metode yang paling dasar dan paling tua. Hal ini dikarenakan dalam beberapa cara peneliti selalu terlibat dalam proses mengamati.

3.2.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang mana pertanyaan diarahkan pada masalah tertentu. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan saling berhadapan atau dengan kata lain wawancara ini dilakukan secara langsung. Wawancara pada penelitian kualitatif membicarakan hal-hal yang diawali dengan beberapa pertanyaan informal.

3.2.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu catatan dari peristiwa yang telah terjadi atau telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun suatu karya monumental dari seseorang. Berdasarkan pendapat Renier, istilah dokumen dapat dibagi menjadi tiga pengertian, yaitu: dalam arti luas, dokumen meliputi semua sumber baik tertulis ataupun lisan; dalam arti sempit, meliputi sumber tertulis saja; dalam arti spesifik, dokumen hanya meliputi surat-surat resmi dan surat negara, misalnya surat perjanjian, undang-undang, dan lain sebagainya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

Data Kuantitatif yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah Jumlah Dana Desa yang diterima, Jumlah Dana Desa yang dianggarkan untuk program pembangunan fisik desa serta besarnya jumlah Dana Desa yang telah terealisasi untuk pembangunan fisik desa Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara.

2. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

Data kualitatif yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah gambaran umum tentang desa Balangtanaya, tata cara Pengelolaan Dana Desa dan Data program pemerintah desa yang berkaitan dengan pembangunan fisik di desa Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara.

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

a. Sumber data primer

Data Primer adalah data peneliti yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimana pun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara face to face untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih muda.

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara purposive sampling. Sesuai dengan namanya purposive sampling diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini :

No.	INFORMAN	JUMLAH
1	Aparatur Desa	
	1. Kepala Lembang /Desa	1 orang
	2. Sekretaris Desa	1 orang
2	Masyarakat di Desa Bangkelekila'	10 orang
3	Kepala Dusun	
	1. Dusun Sangtanete	1 orang
	2. Dusun Torrodasi	1 orang
	3. Dusun Sangkaropi'	1 orang

3.3.3 Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data melalui Library Research yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait

dengan masalah penelitian serta Penelusuran data On Line atau dengan menggunakan fasilitas internet.

3.3.4 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan diteliti yaitu Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Kriyantono menyatakan bahwa, “Riset Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dalam penelitian dengan sedalam-dalamnya”. Penelitian kualitatif ini menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil penelitian.

Alasan memilih penelitian deskriptif kualitatif adalah karena hasil penelitian yang dibutuhkan yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan pelaksanaan terkait efektivitas Dana Desa di Desa Bangkelekila’, Kecamatan Bangkelekila’, Kabupaten Toraja Utara. Sehingga cocok untuk dijadikan penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dengan data yang dikumpulkan berupa kalimat, bagan, gambar yang berfungsi untuk menjelaskan permasalahan. Deskripsi data-data yang diperoleh tersebut sebagai hasil penelitian yang diperoleh dari data-data tertulis maupun lisan yang bersumber melalui orang-orang yang telah diwawancarai.

3.4 Metode Analisis

Mengacu pada jenis penelitian dalam penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif menurut Miles & Huberman Sutopo (2002:94). Teknik analisis data tersebut terdiri dari tiga komponen utama (Sutopo, 2002:91-93), yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara yaitu melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Sajian Data

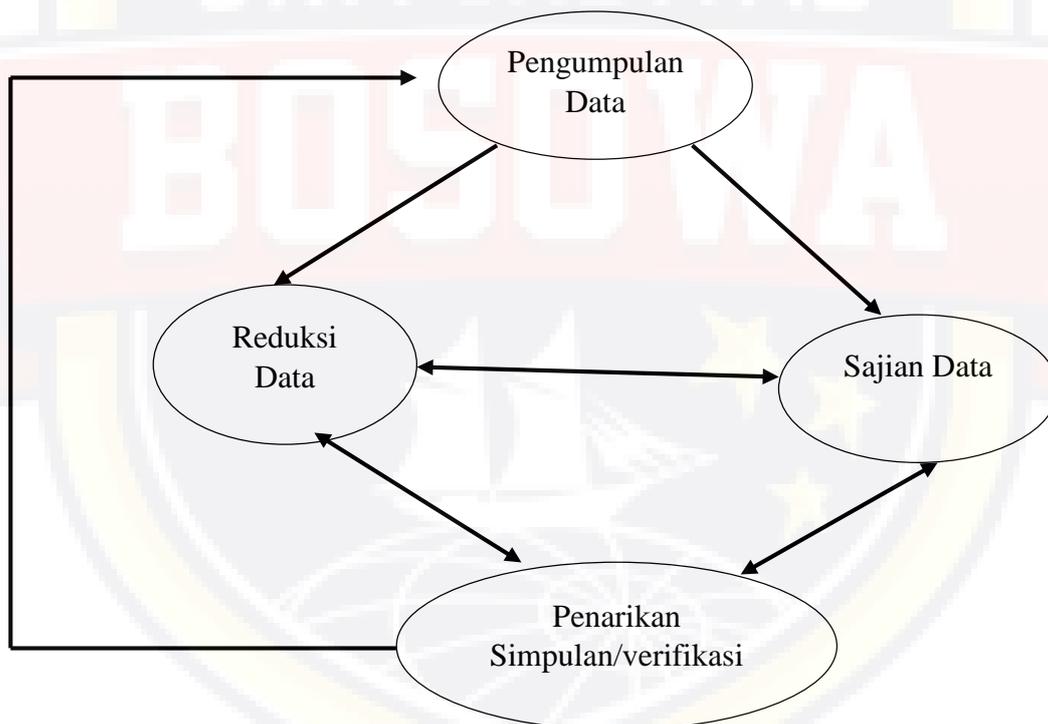
Sajian merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan dengan menggunakan

kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga akan mudah dipahami.

3. Penarikan Simpulan

Tahapan terakhir dalam teknik analisis data interaktif adalah penarikan simpulan. Pada tahap ini peneliti akan melakukan generalisasi dan hasil reduksi data yang kemudian di sajikan secara logis dan sistematis.

Model Analisis Interaktif



Sumber: H. B, Sutopo (2006)

3.5 Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran suatu variabel penelitian kedalam indikator-indikator yang lebih terinci sehingga variabel yang ada dapat diukur. Definisi operasional penelitian ini adalah :

1. Kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar baik itu dari segi sandang, papan, pangan dan meningkatnya pendapatan masyarakat.
2. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan target. Dalam penelitian ini yang disebut output adalah realisasi belanja dari dana desa sedangkan yang disebut target adalah target belanja dari dana desa.
3. Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang 31 ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Toraja Utara yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan Nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pemerinth desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Bangkelekila’.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data yang telah diperoleh melalui observasi, dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil penelitian, serta wawancara terhadap beberapa informan agar penulis mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang diteliti dari informan yang memiliki kompetensi dalam menjawab penelitian tersebut. Adapun uraian hasil dan pembahasan didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila' ,Kecamatan Bangkelekila' ,Kabupaten Toraja Utara.

4.1 Profil Desa Penelitian

4.1.1 Sejarah Lembang Bangkelekila'

Bangkelekila' terdiri dari dua kata yaitu Bangke Le dan Kila' dimana Bangke le dalam bahasa Toraja artinya Luka ya dan Kila' artinya Kilat atau Petir. Nama ini berasal dari nama seorang tokoh yang berkuasa sekitar abad ke 6 yang bernama Bangkelekila' dimana tokoh tersebut diberikan nama demikian oleh orang tuanya karena ketika ibu dari dari Bangkelekila' mau melahirkan, dia menderita 7 hari 7 malam kesakitan dan ketika Bangkelekila' lahir melalui paha ibunya bukan yang semestinya dan bersamaan dengan meledaknya kilat maka ibunya berteriak bahwa bayinya

lahir tapi lahir melalui pahanya sehingga sang suami berteriak dan bertanya dari kolong rumah dalam bahasa Toraja mengatakan Bangke le dan karena kelahiran anaknya bersamaan dengan meledaknya petir sehingga orang tuanya menamakan Bangkelekila'. Setelah Bangkelekila' dewasa dan menjadi pemberani dan berkuasa maka daerah kekuasaannya diberinama Bangkelekila' itulah yang merupakan cikal bakal nama Lembang Bangkelekila'. Ketika Bangkelekila' meninggal dunia maka daerah kekuasaannya di bagi 6 wilayah oleh anaknya yakni :

1. Wilayah To'yasa oleh Ne' Bawapadang
2. Wilayah Akungoleh Tandung Padang, MataSugi' ,Lotong Lila, Aruttadi, Rambu Dama' ,Paribang, Pagiling dan Salipadang, inilah yang menjadi Tuan rumah Bangkelekila' atau menjadi cikal bakal pemekaran.
3. Wilayah Tampan oleh Tengko Kila' dan Datu Limbong.
4. Wilayah Palawa' oleh To Madao.
5. Wilayah Rantepangli oleh Ura' Padang.
6. Wilayah Malakiri oleh Palotongan atau Lotong Sugi

Sekitar abad ke 19 wilayah tersebut diatas disatukan kembali oleh Pemerintah Belanda yang diberi nama Kampung Bangkelekila', yang diperintah oleh Runa dan ketika Runa meninggal Kampung Bangkelekila' kembali lagi seperti tersebut diatas yaitu terbagi 6 wilayah dan ketika masuknya UU No.9 Tahun 1965 Tentang Desa, maka Kampung To' yasa, Kampug Akung dan Tampan disatukan menjadi satu Desa yang diberi nama

Lembang Sangakungan, yang dijabat oleh Makaba (1971-1972). Makaba meletakkan jabatan sehingga diperintah lagi oleh PT Palintin, namun pada tahun 1981 dimekarkan menjadi Lembang Sanakungan, Tampan Bonga, dan Lembang To'yasa Akung. Pada tahun 2003 Sangakungan dan Tampan Bonga digabung kembali menjadi Lembang Sangakungan yang diperintah oleh Marthen Bida kemudian tahun 2006 dimekarkan kembali menjadi dua dan Sangakungan diganti nama menjadi Lembang Bangkelekila' dan tetap dijabat oleh Marthen Bida sampai dengan tahun 2013, pada saat itu diadakan pemilihan dan yang terpilih adalah Elisabeth Tonapa Bsc sampai dengan saat ini.

Selanjutnya perkembangan legenda dan sejarah Lembang Bangkelekila' adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Perkembangan Legenda dan Sejarah Lembang Bangkelekila'

Tahun kejadian	Kejadian baik	Kejadian buruk
1942		Banyak warga yang meninggal yang dikenal dengan peristiwa "Ra'ba Biang"
1943		Busung lapar karena terjadi kemarau yang berkepanjangan
1946		Kemarau panjang

1950		Tidak ada pakaian yang menyebabkan terjadi penyakit kulit massal
1952		Terjadi penyakit cacar
1965		G30S PKI
1966	Terjadi stabilitas keamanan	
1967	Sandang pangan tersedia	
1995	Berdirinya Lembang Bangkelekila'	
2008	Berdirinya kantor Lembang Bangkelekila	

Sumber Data: RPJM Lembang Bangkelekila' tahun 2019-2024

4.1.2 Kondisi Geografis

Lembang Bangkelekila' terletak 4 Km dari ibukota Kecamatan dan 25 Km dari Kota Rantepao yang merupakan ibukota Kabupaten Toraja Utara. Lembang Bangkelekila' mempunyai luas wilayah $\pm 4,71$ Km², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lembang Pebulian, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lembang Bori' Ranteletok, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan To'yasa Akung, Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara

Lahan pertanian berupa lahan sawah yang subur seluas sekitar 3.550 ha yang terbentang luas tersebar disetiap kampung. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi yang tepat.

4.1.3 Demografi

Lembang Bangkelekila' mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.003 jiwa.

Tabel 4.2

Jumlah penduduk tahun 2020

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1	Sangtanete	356	297	653	127
2	Sangkaropi	463	355	818	156
3	Torrodasi	298	234	532	97
Total		1.117	886	2.003	380

Sumber Data: Profil Lembang Bangkelekila' Tahun 2021

Tabel diatas menggambarkan bahwa Lembang Bangkelekila' memiliki jumlah penduduk 2.003 Jiwa. Dengan perbandingan jiwa penduduk dari semua tingkatan usia laki-laki 1.117 jiwa dan perempuan 886 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi dibandingkan penduduk perempuan.

4.1.4 Sosial Budaya

4.1.1.1 Bidang keagamaan

Penduduk Lembang Bangkelekila' keseluruhan beragama kristen yaitu Protestan dan Khatolik.

4.1.1.2 Bidang Pendidikan

Tabel 4.3

Sarana Pendidikan di Lembang Bangkelekila Tahun 2021

No.	Jenis Pendidikan	Gedung	Guru	Murid
1	SD	1	2	56
2	TK	1	12	212

Sumber Data: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat 2 jenis sarana pendidikan di Lembang Bangkelekila' yaitu 1 TK dan 1 SD. Total jumlah siswa yang ada adalah 278 siswa dan terdapat 14 guru.

4.1.1.3 Bidang Ekonomi

Penduduk Lembang Bangkelekila' memiliki pekerjaan dalam bidang pertanian, perdagangan, Buruh dan PNS.

Tabel 4.4
Mata Pencaharian

PETANI	PEDANGANG	PNS	BURUH
224	47	23	43

Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas penduduk Bangkelekila' bekerja sebagai petani, pedagang, PNS dan buruh.

4.1.5 Pemerintahan

Lembang Bangkelkila menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa demokrasi yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik dengan jumlah perangkat yang memadai. Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan desa perlu adanya suatu program

pembangunan dan penataan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kerangka program kegiatan RPJM-Des dan RKPDes.

4.2 Gambaran Pemerintahan Lembang Bangkelekila'

4.2.1 Visi dan Misi

4.2.2.1 Visi

Visi pembangunan Lembang Bangkelekila' merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJP Daerah Kabupaten Toraja Utara, substansi RPJM Daerah Kabupaten Toraja Utara, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Lembang Bangkelekila' serta visi dan misi kepala Lembang terpilih. Adapun Visi Lembang Bangkelekila' yaitu "Terwujudnya kehidupan masyarakat Lembang Bangkelekila' yang religius, aman, harmonis, maju, adil, dan tertib".

4.2.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai cara-cara yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Adapun Misi Lembang Bangkelkila' yaitu:

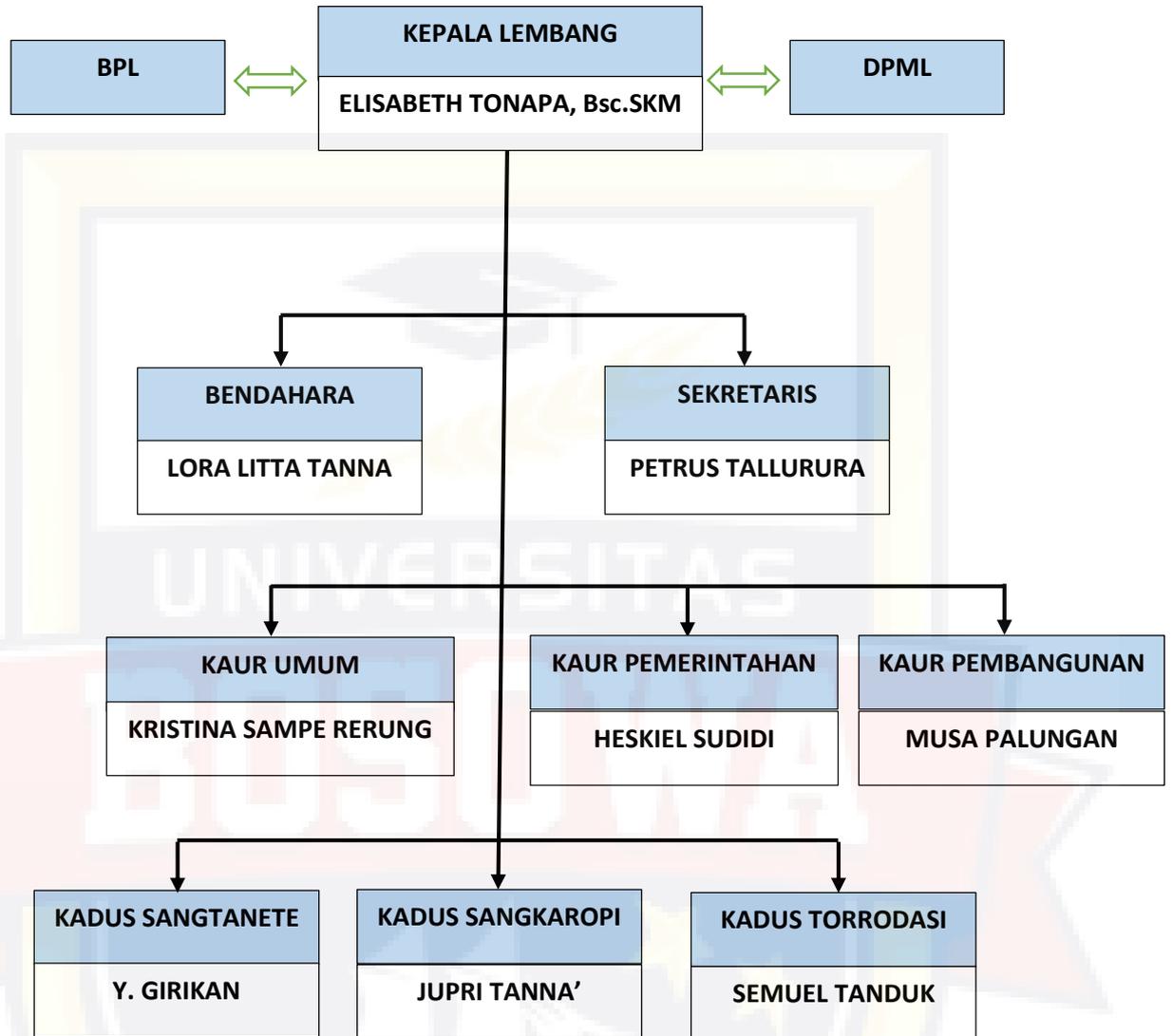
- a. Membenahi dan mengoptimalkan fungsi dan sistem pemerintahan Pemerintahan serta mendorong terciptanya sinergi antara aparat dalam wilayah pemerintaha Lembang disetiap jenjang atau tingkatan (Lembang, Kampung, RK, RW, dan RT) guna meningkatkan efektifitas kinerja segenap aparat Lembang untuk menjawab tantangan sebagai

“pelayan” Masyarakat dalam memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan.

- b. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur Lembang dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang bermutu, mudah dan murah dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu (RTM).
- c. Mengembangkan dan mengelolah seluruh potensi sumber daya ekonomi dan sumber daya alam dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas serta pendapatan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.
- d. Memperkokoh pronsip-prinsip kehidupan beragama , yang bermasyarakat dan berwawasan budaya dalam rangka terciptanya tatanan sosial kemasyarakatan Lembang Bangkelekila’ yang beriman, bermoral, persekutuan, saling menghormati, aman dan damai.

4.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan tanggungjawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggungjawabannya. Dengan adanya struktur pemerintahan ini sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat desa yang akan saling berkoordinasi.



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Lembang Bangkelele' Tahun 2021

4.2.2.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah Lembang Bangkelekila'

Berikut merupakan penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari Kepala Lembang dan Perangkat Lembang di Lembang Bangkelekila':

1. Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas pokok tersebut, Kepala Desa juga memiliki tugas sebagai berikut:

- a Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan RI.
- b Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- d Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN.
- f Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa.
- g Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik.
- i Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.
- j Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.

k Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa yang dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.

l Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.

m Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

n Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.

o Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

p Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.

q Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota, melalui camat satu (1) kali dalam satu (1) tahun.

r Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu (1) kali dalam satu (1) tahun dalam masyarakat BPD.

s Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas.

t Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan kepada BPD.

2. Sekretaris Desa

- a Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
 - b Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris Desa.
 - c Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris Desa dan keadaan umum Desa.
 - d Merumuskan program kepada Kepala Desa.
 - e Melaksanakan unsur surat menyurat, kearsipan dan laporan.
 - f Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
 - g Penyusunan rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
 - h Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
 - i Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
 - j Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
 - k Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.
3. Kepala Urusan Pemerintahan
- a Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan di Desa.
 - b Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
 - c Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
 - d Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa.

- e Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, antara lain: RT, RW, dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil.
 - f Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa.
 - g Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - h Melaksanakan, mengawasi, serta membina kegiatan sosial politik lainnya
4. Kepala Urusan Umum
- a Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa, mempunyai tugas keluar serta melaksanakan kearsipan.
 - b Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
 - c Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
 - d Melaksanakan dan mengushakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa.
 - e Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
 - f Mencatat inventarisasi kekayaan desa.
 - g Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya.
 - h Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
5. Bendahara Desa

- a Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - b Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan
 - c Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa.
 - d Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa.
 - e Merencanakan penyusunan APBDes untuk mengkonsultasikan dengan BPD.
 - f Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.
6. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan salah satu dari perangkat desa yang wewenangnya berada di bawah dari Kepala Desa.

- a Kepala Dusun adalah perangkat desa yang kedudukannya sebagai pembantu dari Kepala Desa.
- b Memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman dan juga pembangunan.
- c Melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- d Melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa.
- e Membantu kepala Desa diberbagai kegiatan.
- f Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa.

4.3 Efektivitas Pengelolaan Dana Lembang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Lembang Bangkelekila'

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sementara itu sebagai penuntun penyelenggaraan Pembangunan Desa disusun panduan penyelenggaraan Pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa (goods and service) . Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur.

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat di Lembang Bangkelekila'. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar.

Pemerintah Lembang Bangkelekila' sampai saat ini terus memaksimalkan pembangunannya, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi

perhatian lebih pemerintah Lembang adalah di bidang infrastruktur terutama perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Hal tersebut berdasarkan keterangan Kepala Lembang Bangkelekila' Ibu Elisabeth Tonapa :

“Untuk pembangunan, kalau dari infrastruktur fisik seperti gedung itu cukup baik, Yang menjadi perhatian khusus bagi kami di tahun anggaran 2021 adalah pembangunan jalan, dan jembatan yang merupakan jalur transportasi masyarakat sehari-hari untuk menjalankan aktifitasnya.”

Berdasarkan wawancara di atas fokus pembangunan di tahun 2021 Lembang Bangkelekila' adalah pembangunan di bidang infrastruktur yakni jalan, irigasi, dan jembatan. Kebutuhan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur jalan merupakan masalah utama masyarakat di Lembang Bangkelekila' seperti di ungkapkan Bapak Nopi yang merupakan masyarakat setempat:

“Kalau pembangunan yang paling di butuhkan di Kampung ini itu pasti jalan, karena sebagian besar jalan disinikan sangat rusak, juga masih banyak jalan yang belum di beton, itu menyulitkan kami untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kadang motor yang kami gunakan untuk mengangkut padi terjebak di jalanan karena jalan yang rusak”

Berdasarkan observasi penulis, dari keseluruhan total jalan yang ada di Lembang Bangkelekila' yakni 26,5 Km, kondisi jalan poros yang seluruhnya telah dibeton mengalami kerusakan parah, sementara jalan desa 75% berupa pengerasan jalan, 15% berupa jalan beton dengan lebar 2,5m dan 10% masih berupa tanah. Kondisi ini sering kali membuat masyarakat dalam kesulitan, jalan yang masih bebatuan sering kali membuat masyarakat pengendara roda dua terjatuh, belum lagi kondisi jalan yang hanya memiliki lebar 2,5M membuat

kendaraan roda empat sulit melewatinya karena jalan yang sempit ini membuat mobil tidak dapat bertemu.

Lembang Bangkelekila' memiliki beberapa program pada bidang pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pelayanan dasar yang bermutu, mudah dan murah dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu (RTM), sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur antara Kampung, RK,RW dan RT serta jalan pendukung roda perekonomian masyarakat yang meliputi pembangunan jalan, jembatan dan drainase serta sarana prasarana lainnya terutama pada wilayah yang berpotensi menggerakkan perekonomian Lembang.
2. Perbaikan jalan pada sentra-sentra penegmbangan pertanian, perkebunan dan usaha produktif lainnya.
3. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi (irigasi Lembang).

Program-program tersebut lebih lanjut di jelaskan oleh Kepala Lembang Bangkelekila':

“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk perbaikan kualitas pembangunan khususnya di bidang infrastruktur dengan menjalankan program-program pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, misalnya saat ini kami fokuskan pada kebutuhan utama masyarakat yakni perbaikan jalan yang rusak.”

Dengan adanya pembangunan prasaranan jalan dan jembatan, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertaniannya agar lebih mudah dll. Hal tersebut senada dengan pernyataan Ibu Miryam Patanduk selaku Sekretaris Lembang Bangkelekila' :

“Peningkatan infrastruktur pedesaan merupakan sarana yang paling dibutuhkan masyarakat dalam rangka mempermudah akses, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan Desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Namun keterlibatan partisipasi masyarakat di Lembang Bangkelekila’ masih perlu ditingkatkan, hal itu berdasar pada pernyataan Kepala Lembang Bangkelekila’:

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di sini masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas mulai dari perencanaan sampai evaluasi”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pasal 78, Pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan atau Pengawasan. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Pengelolaan dana desa ini dikelola langsung oleh aparatur desa, kepala desa sebagai penanggung jawab program, sedangkan sekretaris desa sebagai ketua pelaksanaan program. Proses penentuan program ADD di desa 'Bangkelekila' ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk membiayai program-program yaitu:

Pembagian Dana ADD

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 394.032.550
b. Bidang Pembangunan	Rp. 751.464.526
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 11.827.600
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 194.767.000
e. Bidang Penanggulangan Masyarakat	Rp. 425.430.000

JUMLAH

Rp. 1.202.231.376

Dana dana desa di bagi menjadi beberapa bidang yaitu :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp.182.900.000,00
Operasional perkantoran barang dan jasa	Rp.43.193.500,00
Pengadaan peralatan kantor	Rp.29.452.000,00
Pemeliharaan gedung Posyandu	Rp.11.346.250,00
Pemeliharaan kendaraan dinas	Rp.1.800.000,00
Belanja Modal	Rp.31.350.000,00
Operasional kepala dusun	Rp.1.705.800,00
Honorarium+konsumsi rapat	Rp.18.400.000,00
Peralatan elektronik kantor	Rp.2.210.000,00
Pemeliharaan balai desa	Rp15.000. 000
Operasional rt	Rp.58.380.000,00
Jumlah	<u>RP. 394.032.550</u>

Bidang Pembangunan

Lanjutan Rabat Beton Rantetallang-Sangtanete	Rp.156.954.818
Pek. Gorong-gorong bertulang Sangkaropi-Tordodasi	Rp.17.836.679
Lanjutan rabat beton tetewaiSamorron	Rp. 198.820.700
Perbaikan Jalan Sangkaropi	Rp. 70.785.867

Pengerasan jalan maninnikTo'Batu	Rp. 148.236.590
rabat beton tetewai-Katebang	Rp. 158.829.872

Jumlah **Rp. 751.464.526**

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Pkk	Rp.3.850.000,00
Pembinaan Pemuda Dan Karang Taruna	Rp.3.320.000,00
Pembinaan Operator Kampung	Rp.3.277.600
Kegiatan Pembinaan Anak Usia Dini	Rp. 1.500.000

Jumlah **Rp. 11.827.600**

Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana	Rp.8.177.000
Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Rp.22.700.000
Bantuan Insentif Guru Paud	Rp.20.190.000
Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	Rp.12.800.000
Penyelenggaraan Festival Kesenian Dan Kebudayaan	
Tingkat Desa	Rp.130.900.000

Jumlah **Rp 194.767.000**

Bidang penanggulangan bencana

Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Rp. 422.400.000
Penyediaan Antiseptic	Rp. 950.000
Penyediaan Alat Pelingdung Diri	Rp. 2.080.000
Jumlah	<u>Rp. 425.430.000</u>

4.3.1 Perencanaan

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Sekretaris Lembang Bangkelekila' selaku ketua tim penyusunan RPJM Lembang dan RKP Lembang:

“Dua dokumen tersebut (RPJM Lembang dan RKP Lembang) adalah pedoman dalam penyusunan APB Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah”

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Lembang Bangkelekila' masa jabatan Kepala Lembang saat ini adalah 2020-2025. Maka

dari itu, fokus penelitian adalah pelaksanaan pembangunan berdasarkan RKP tahun anggaran 2021 yang telah terlaksana.

Dalam tahap musyawarah Lembang dan Musyawarah rencana pembangunan Lembang di Lembang Bangkelekila' kehadiran masyarakat masih kurang. Sosialisasi dalam pembangunan partisipatif masih sangat kurang, karena belum ada terlihat usaha yang lebih dari pihak-pihak yang wajib untuk melibatkan masyarakat dalam musrenbangdes, dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat.

Walau kehadiran masyarakat pada saat musyawarah Lembang masih kurang, namun pada saat musyawarah dusun yang dilaksanakan sekitar bulan april, kehadiran masyarakat sudah cukup baik seperti yang di ungkapkan Kepala Dusun Torodasi Bapak Samuel Tanduk :

“Biasanya saat musyawarah Lembang dan MusrenbangLem masyarakat yang hadir memang sedikit, tapi saat musyawarah dusun dilaksanakan itu masyarakat yang hadir sekitar 20 sampai 30 orang. Jadi disitu mereka memberi masukan mengenai kebutuhan pembangunan di dusun sini, dan hasilnya di bawah ke musyawarah Lembang”

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan salah seorang masyarakat yaitu Bapak Yusup Bebung Pala, penyebab kurangnya partisipasi masyarakat saat musyawarah Lembang adalah cara pikirnya, dimana masyarakat menganggap bahwa kepala dusun dan beberapa masyarakat sudah cukup mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada.

“kalau musrenbangDes biasanya diikuti oleh pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan dari setiap dusun saja. Karena tidak mungkin seluruh masyarakat akan ikut hadir dalam rapat tersebut, apalagi masyarakat sudah memberi masukan saat musyawarah dusun, jadi perwakilan yang hadir saya rasa sudah cukup”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan di Lembang Bangkelekila' masih kurang baik. Masyarakat ikut memberi ide dan masukan terhadap pembangunan mengenai kebutuhan prioritas masyarakat dalam lingkungannya pada saat musyawarah dusun, namun partisipasinya dalam musyawarah Lembang masih kurang dan hanya diwakili oleh beberapa masyarakat di setiap dusun.

5.1 Pelaksanaan

Dilihat dari hasil penelitian Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan fisik Desa Bangkelekila' bahwa pengelolaan yang dilakukan 2021 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Bangkelekila' yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama seperti pembangunan jalan, pembangunan sarana puskesmas, perbaikan jalan , perbaikan sarana dan prasarana, dan lain lain, yang seharusnya dilakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang ada didesa. Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Bangkelekila' adalah sudah

dilakukannya dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di Desa Bangkelekila', apa lagi dalam hal pelaksanaannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh sopir pengangkut material dikarenakan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK), sehingga di harapkan Tim TPK dapat lebih mengoptimalkan dalam hal pengawasan agar tidak terdapat kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan Desa Bangkelekila'.

pembangunan yang terlaksana di Lembang Bangkelekila' tetap membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya, salah satunya yang dirasakan Bapak Yusup Bebeng Pala:

“Bagi kami perbaikan jalan itu sudah cukup, setidaknya dengan perbaikan jalan di sini rumah kami yang jauh dari jalan poros tidak susah lagi membawa hasil panen, sekarang motor bisa lewat tidak seperti waktu masih berupa tanah”

Pelaksanaan kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2021 tetap memberi dampak positif bagi beberapa masyarakat yang ada. Meski demikian Pemerintah Lembang Bangkelekila' perlu meningkatkan pembangunannya khususnya infrastruktur jalan guna membuka kelancara transportasi darat bagi masyarakat.

5.2 Pertanggung Jawaban

Sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada

Bupati/Wali kota setiap akhir tahun anggaran. Khususnya pertanggungjawaban Dana Desa mendanai pada bidang pembangunan desa/kesejahteraan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pertanggungjawaban Dana Desa dibuat tersendiri dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan program-program yang dibiayai dari DD yang telah direncanakan dalam RKPDes. Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bukti atas pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya. Lembang Bangkelekila' dalam membuat laporan pertanggungjawaban didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara desa/lembang dengan didampingi oleh pendamping kecamatan. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dilaksanakan sendiri tanpa menggunakan jasa pihak ketiga seperti pernyataan bendahara lembang:

“dalam pembuatan laporan kami kerjakan sendiri, ada lembang yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat laporan, tetapi kami berusaha untuk mengerjakan sendiri, selain itu kami juga menyampaikan hasil laporan kami kepada pemerintah kabupaten setempat”

Dalam mempertanggungjawabkan Dana Desa di lembang Bangkelekila' harus memiliki prinsip transparan kepada masyarakat desa/lembang seperti yang dikatakan oleh kepala lembang:

“selain memasang spanduk transparansi, kami juga memasang prasasti atas semua apa yang telah dikerjakan, dimana titik pengerjaan disitu kami memasang prasasti contohnya pengerasan

jalanan dimana titik pekerjaan jalan disitu kami memasang prasasti sehingga jika ada tim pemeriksa datang mereka dapat turun langsung untuk melihat apa yang telah kami kerjakan”.

Dalam hal ini, adapun pendapat masyarakat lembang mengenai pertanggungjawaban Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa/lembang di Lembang Bangkelekila’ seperti yang dikatakan oleh Meti Bida sebagai masyarakat setempat:

“memang sudah ada pekerjaan jalan, namun belum maksimal dikarenakan tidak ada pengerasan jalan sehingga jalannya becek dan penuh dengan lumpur dan aktivitas sehari-hari kami tidak efektif dikarenakan kondisi jalan yang belum layak seperti jika kami ke pasar dan harus melalui jalan yang rusak sedangkan jarak pasar dari sini jauh dikarenakan juga disini belum mempunyai pasar desa”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban Dana Desa di Lembang Bangkelekila’ telah sesuai dengan permendagri No. 133 tahun 2014. Pemerintah lembang Bangkelekila’ telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten, selain itu pertanggungjawaban Dana Desa juga disampaikan kepada masyarakat setempat tetapi pekerjaan yang dilakukan belum efektif dikarenakan Dana Desa yang kurang memadai untuk memaksimalkan semua pembangunan yang di danai oleh Dana Desa.

4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Bangkelekila’ Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan desa

merupakan salah satu rangkaian dasar dalam keberhasilan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

4.4.1 Faktor Pendukung

1. Dana

Dalam pelaksanaan pembangunannya, pemerintah desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang ada, oleh karena itu adanya dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Lembang Bangkelekila’.

Meskipun dalam pelaksanaannya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintah Lembang Bangkelekila’ mengungkapkan bahwa faktor utama pendukung pembangunan di Lembang Bangkelekila’ adalah Dana.

2. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Lembang Bangkelekila’:

“Faktor pendukung yang lain adalah partisipasi masyarakat, walau belum maksimal namun keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide dan masukan terhadap permasalahan yang mereka hadapi, sangat membantu dalam penyusunan rencana kerja agar pembangunan dilaksanakan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat.”

4.4.2 Faktor Penghambat

1. Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan masyarakat itu menjadi salah satu faktor penghambat, karena kebiasaan seperti itu dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk berbuat curang.

2. Cuaca dan Medan

Yang menjadi permasalahan keadaan cuaca yang tidak menentu. Cuaca merupakan kendala yang tidak bisa ditebak karena setiap saat dapat berubah membuat pelaksanaan program dapat mundur dari jadwal yang direncanakan, ditambah dengan medan yang sulit untuk dijangkau terutama saat musim hujan tiba.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Lembang di Bangkelekila' Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa belum Efektif namun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. pemerintah Lembang Bangkelekila' memfokuskan pada pembangunan jalan dan perbaikan jalan rusak sebagai sarana transportasi darat masyarakat. Hal itu sudah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, meski belum maksimal namun terlihat partisipasi masyarakat sudah cukup baik dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah mulai dari musyawarah dusun, musyawarah Lembang hingga Musyawarah perencanaan pembangunan Lembang.
2. Dalam pengawasan dan pembangunan Pemerintah Daerah sudah melakukan pengawasan terhadap pemerintah Lembang Bangkelekila' namun pengawasan yang dilakukan masyarakat masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas mulai dari perencanaan sampai evaluasi dan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Lembang Bangkelekila' yang ingin memiliki Infrastruktur yang bagus.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diajukan beberapa hal yang diharapkan bisa diterapkan yaitu:

1. Untuk pemerintah ataupun Instansi terkait memperhatikan pelatihan pengelolaan keuangan untuk aparatur desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang diharapkan kedepannya dalam pengelolaan keuangan dana Desa bisa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prosedur yang ditetapkan. Untuk pemerintah desa Lebih memaksimalkan pembangunan khususnya di bidang pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi permasalahan utama masyarakat di Lembang Bangkelekila'.
2. Lebih meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana untuk keperluan pemerintahan Lembang, agar tidak menjadi peluang bagi pemerintah Lembang untuk melakukan penyelewengan dana.

DAFTAR PUSTAKA

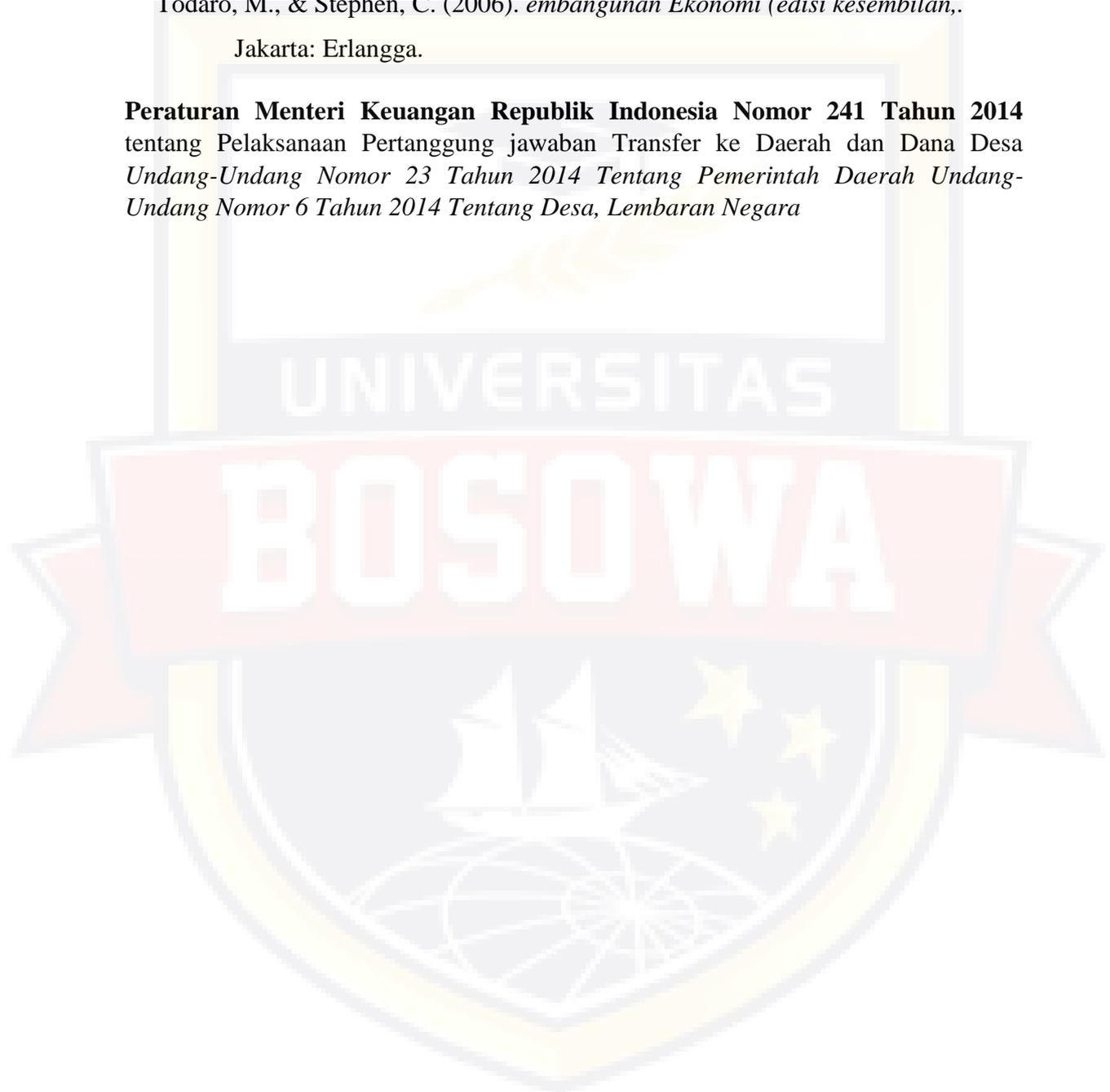
- Adi, F. P. (2017). *Sains undercover : memahami apa yang tersembunyi dari sains dengan cara lain*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Dr. Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA, Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 – 32*.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama*. Jakarta: Salemba empat.
- Iver Turere, R. S. (2018). Efektivitas Dana Desa (DD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat DI Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 19*.
- Joko, P. A. (2006). Analisis Efektivitas Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Batang (Tesis).
- Natsir, M. (2017). Analisis Pelaksanaan Pembagunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara.
- Pangalo, T. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20*.
- Purwanto, A., Erwan, dan, & Sulistyastuti, D. (2015). *Implementasi kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soetomo. (2014). *Kese*

jahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal.

Penerbit Pustaka Pelajar.

Todaro, M., & Stephen, C. (2006). *embangunan Ekonomi (edisi kesembilan,.*
Jakarta: Erlangga.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara





UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASME

NOMOR : A. 569 /FEB/UNIBOS/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: Ardo Rante
Stambuk	: 4518012051
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi Dan Bisnis / Manajemen

Dinyatakan bebas dari Plagiasme dengan batas maximal 30% dengan rincian Skripsi 27%, Jurnal 22% yang berhubungan skripsi dengan judul:
"Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bangkelekila'.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 27 Juli 2022



Dr/Hj. Herminawaty Abubakar, S.E., M.Si.

NIDN . 0924126801

FORMULIR PENGAJUAN PENERBITAN

Nama Lengkap : Ardo Rante
Stambuk : 4518012051
Alamat : BTN. TNI Angkatan Laut B9 No.7
Telpon/HP : 082282363035
E-mail : ardorante66@gmail.com
Judul Skripsi :

"Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bangkelekila'.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benar bahwa:

1. Naskah yang diserahkan adalah karya asli dan bebas dari fabrikasi, plagiasi, duplikasi dan Pelanggaran hak cipta data/isi.
2. Naskah belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dipertimbangkan oleh penerbit lain
3. Apabila dikemudian hari ada implikasi terhadap hal-hal yang disebutkandi atas, bukan menjadi Tanggung jawab Penerbit dan Dewan Editor.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan jujur dan bertanggung jawab,

kassar, 27 Juli 2022



Ardo Rante

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN



1 2 0 2 2 1 9 3 0 0 4 2 3 0

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 29159/S.01/PTSP/2022
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Toraja Utara

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Bosowa Makassar Nomor : A.318/FEB/UNIBOS/IV/2022 tanggal 01 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ARDO RANTE
 Nomor Pokok : 4518012051
 Program Studi : Manajemen
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA LEMBANG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI LEMBANG BANGKELEKILA "

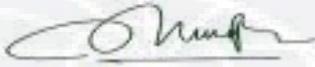
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 04 April s/d 04 Mei 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 04 April 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
 2. Peringkat

KABUPATEN TORAJA UTARA
LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : PTSP Prov Sul-Sel	Diterima Tgl : 05 April 2022
Tanggal Surat : 04 April 2022	No. Agenda : 516 / Bj Sekda
Nomor Surat : 29159/c.01/PTSP/2022	Diteruskan kepada :
Isi Disposisi <i>Facilitasi beasiswa Ketenangan yg berkelu-</i>	1. <i>Keban Kesbang pol</i>
<i>U</i> <i>5-4-2022</i>	2. <i>Kadis RTSP</i>
	3.
	4.

Tanda tangan/Paraf
Tanggal, Bulan dan Tahun
Pembuatan

Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 19850603 198003 2 011

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Sulawesi Makassar di Makassar;
2. Penerima

DPMPPTSP 04-04-2022

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax: (0411) 448506
Website : http://dmpptsp.sulselprov.go.id Email : dmpptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pongtiku No.32 Rantepao Telp : (0423) 2922333 Email : dmpptsp.torut@gmail.com
Website : http://dmpptsp.torajautarakab.go.id

REKOMENDASI
Nomor : **072/SRP/DPMPPTSP/IV/2022**

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 29159/S.01/PTSP/2022, Perihal Izin Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian an :

Nama : **Ardo Rante**
Nomor Pokok : **4518012051**
Program Studi : **Manajemen**
Alamat : **Bangkelekila'**

yang bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Lembang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Lembang Bangkelekila'** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal **5 April 2022** sampai **5 Mei 2022**, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen **copy** hasil "**Pengambilan Data Awal**" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Pengambilan Data Awal** tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
- Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
- Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang- Rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 5 April 2022
KEPALA DPMPPTSP,
Ditandatangani secara elektronik oleh
Ir. **HARITPATRIATNO, M.Si**
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19670503 199103 1 015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Toraja Utara (Sebagai Laporan);
- Kepala Satuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Marante;
- Kepala Lembang Bangkelekila' di Bangkelekila';
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Pertinggal;



SEKRETARIS



KEPALA DESA DAN PENDAMPING
DESA



KEPALA LEMBANG dan BENDAHARA

Kondisi Umum Jalan Di Desa Bangkelekila



Perbaikan Jalan Sangkaropi?



Lanjutan Rabat Beton Rantetallang-Sangtanete



Sebelum



sesudah

Pengerasan jalan Maninnik To'Batu



Duiker



UNIVERSITAS

Gorong Gorong





Kantor Lembang Bangkelekila



Gereja



Posyandu